

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menyebabkan terjadinya perubahan di berbagai wilayah, termasuk daerah yang sebelumnya sepi atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan jumlah penduduk mendorong kebutuhan akan lahan permukiman, sehingga banyak lahan kosong maupun lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Menurut Desmawan (2025), pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menjadi faktor utama terjadinya perubahan lahan pertanian menjadi permukiman dan kawasan industri. Hal ini juga diperkuat oleh Pradana (2025) yang menyatakan bahwa perubahan penggunaan lahan di wilayah pedesaan dan pinggiran kota terjadi dikarenakan respons terhadap meningkatnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan fasilitas pendukung. Akibatnya, desa yang sebelumnya didominasi lahan kosong dan pertanian berkembang menjadi kawasan dengan bangunan yang lebih maju dan tertata. (Desmawan, 2025; Pradana, 2025)

Bertambahnya jumlah penduduk yang berdomisili di berbagai lokasi di desa-desa turut mendorong perkembangan kondisi beberapa desa menjadi lebih baik, terutama ketika didukung oleh perencanaan pembangunan nasional yang gencar, seperti melalui program Dana Desa. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, alokasi Dana Desa terus meningkat dari sekitar Rp 20,7 triliun pada awal program menjadi sekitar Rp 71 triliun di tahun 2024, dengan total realisasi lebih dari Rp 608,9 triliun yang telah disalurkan ke lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia. Alokasi dana yang besar ini dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan mendukung percepatan pembangunan desa apabila dana tersebut dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Data juga menunjukkan bahwa jumlah desa mandiri meningkat signifikan dari hanya sekitar 11.456 desa pada 2023 menjadi 17.203 desa pada 2024, sementara persentase penduduk miskin di desa menurun dari periode sebelumnya, mencerminkan dampak positif Dana Desa terhadap kondisi sosial-ekonomi pedesaan. (Kementerian Desa PDTT, 2024; BPS, 2024)

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa pada saat sekarang ini perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang dan jeli, agar semua pelaksanaan pembangunan di desa dapat dijalankan dengan baik dan hasil yang dicapai juga baik. Hal ini dapat membuat masyarakat

desa lebih maju dan semakin sejahtera. Kesalahan perencanaan pembangunan dapat berakibat pada kurang maksimalnya pelaksanaan program pembangunan desa, dan akhirnya akan menjadi sia-sia mengingat pembangunan desa dilaksanakan secara serampangan. (Adisasmita, 2011)

Pada saat mempersiapkan pembangunan di desa perlu dilakukan beberapa kali pembahasan dan musyawarah untuk menentukan beberapa titik yang akan dilakukan pembangunan, kemudian pembahasan terhadap rencana anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut. Berbagai pembahasan dan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa bersama tim-tim pelaksana yang lainnya, sehingga semua rencana pembangunan tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. (Abe, 2002)

Dengan melaksanakan musyawarah untuk menentukan berbagai kebijakan di pemerintahan desa merupakan wujud kebersamaan dalam masyarakat desa tertanam kuat, sehingga segalanya tidak hanya mengikuti kemauan pimpinan atau pejabat yang ada di atas. Masyarakat desa dalam hal ini turut serta menentukan nasib desanya agar dalam mencapai kemajuannya sesuai dengan harapan masyarakat desa tersebut. (Sutoro Eko, 2014)

Kegiatan musyawarah yang diterapkan pemerintahan desa untuk mengatur segala bentuk pembangunan desa adalah merupakan suatu perilaku demokrasi yang terjadi di masyarakat desa. Hal ini sangat penting dalam menentukan posisi atau sasaran pembangunan yang akan dijalankan agar semua kegiatan pembangunan desa dapat sesuai dengan keinginan dan kemauan masyarakat desa. Mengingat pembangunan akan mempunyai makna yang sangat penting bagi masyarakat dalam upaya memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. (Dwipayana, 2003)

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tidak hanya berbentuk fisik dengan keterlibatan secara langsung didalam pembangunan desa, dan masyarakat dapat berpartisipasi dengan berperan aktif di dalam kegiatan musyawarah atau pertemuan yang diselenggarakan bersama tim pembangunan desa. Dalam kegiatan musyawarah tersebut masyarakat bebas menyampaikan berbagai masukan dan saran untuk menentukan dan menetapkan pola kerja pembangunan yang akan dijalankan di desa tersebut. (Cohen & Uphoff, 1980)

Kegiatan musyawarah yang dilaksanakan di Desa Kutukulon Kecamatan Jetis tersebut sebagai wujud dan merealisasikan atau bentuk penerapan demokrasi dalam pembangunan di desa. Perjalanan musyawarah yang diikuti banyak orang yaitu terdiri dari perangkat, pejabat tokoh masyarakat dan masyarakat Kutukulon tersebut akan terjadi adanya proses demokrasi di desa tersebut. Dengan terjadinya musyawarah yang membahas rencana kegiatan

pembangunan desa Kutukulon tersebut, maka semua peserta musyawarah benar-benar terlibat dalam proses demokrasi dalam pembangunan desa Kutukulon Kecamatan Jetis Ponorogo. (Slamet, 2003)

Dalam melakukan pembangunan desa masyarakat secara langsung terlibat dalam bentuk partisipasinya mulai dari rapat perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menjadikan masyarakat merasa dihargai sebagai warga masyarakat dan nilai demokrasi yang terjadi sangat nyata dan benar terasa sekali. Mengingat jika masyarakat banyak dilibatkan dalam pembangunan tersebut, maka sudah barang tentu akan memperlancar dan memudahkan program pembangunan desa tersebut. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat besar nilainya dalam mewujudkan terciptanya penerapan demokrasi dalam kegiatan pembangunan desa, sebab masyarakat menjadi lebih merasakan nilai pembangunan dan ikut memiliki terhadap desanya. (Ndraha, 2005)

Program pembangunan desa di Desa Kutukulon Kecamatan Jetis Ponorogo berupaya menjalankan kegiatan pembangunan dengan menganut prosedur yang melibatkan seluruh masyarakat desa. Namun demikian tidak semua masyarakat mau ikut serta dalam pertemuan persiapan awal pembangunan di desa tersebut. Akan tetapi adapula yang melakukan atau bersikap acuh tak acuh. Beberapa masyarakat ada yang merasa tidak ada urusan dengan berbagai program pembangunan di Desa Kutukulon tersebut. Karena program pembangunan desa tersebut menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah dan dananya juga dianggap dari pemerintah, kemudian masyarakat itu ya tinggal menikmati. Hal semacam itu yang menjadikan terkadang upaya pelaksanaan demokrasi di desa sulit dilaksanakan. (Slamet, 2003)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam kesempatan penelitian ini mengambil sebuah judul: **IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN** (Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Kutukulon Kecamatan Jetis Ponorogo)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka selanjutnya akan disampaikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi nilai demokrasi dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kutukulon Kecamatan Jetis Ponorogo ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan desa di Desa Kutukulon Kecamatan Jetis Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya akan disampaikan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan demokrasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kutukulon Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Kutukulon Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, ilmu politik, dan pembangunan pedesaan. Penelitian ini dapat menambah kajian mengenai penerapan nilai-nilai demokrasi, seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan musyawarah dalam proses pembangunan pedesaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara demokrasi dan pembangunan di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, khususnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Bagi masyarakat desa, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi kebijakan publik sebagai bahan rujukan dalam merancang dan mengevaluasi program pembangunan pedesaan yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi.

E. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan, nilai, atau konsep dalam bentuk tindakan nyata. Dalam penelitian ini, implementasi merujuk pada pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam setiap tahapan pembangunan pedesaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

2. Nilai Demokrasi

Nilai demokrasi adalah prinsip-prinsip dasar yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, seperti partisipasi masyarakat, musyawarah, keterbukaan (transparansi), keadilan, dan akuntabilitas. Dalam konteks penelitian ini, nilai demokrasi dipahami sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pembangunan desa.

3. Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan adalah proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun infrastruktur. Dalam penelitian ini, pembangunan pedesaan difokuskan pada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga desa dalam proses pembangunan, baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, maupun pengawasan kegiatan pembangunan desa.

5. Musyawarah Desa

Musyawarah desa adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat. Dalam penelitian ini, musyawarah desa dipandang sebagai wujud nyata penerapan nilai demokrasi di tingkat pedesaan.

6. Transparansi

Transparansi memiliki arti keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan, program, dan penggunaan anggaran desa kepada masyarakat secara jelas dan mudah.

7. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab pemerintah desa atas pelaksanaan kebijakan dan pembangunan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pengertian Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara berkelanjutan menuju kondisi yang lebih baik dengan berlandaskan norma-norma tertentu. Pemaknaan terhadap pembangunan sangat beragam karena dipengaruhi oleh sudut pandang individu, wilayah, maupun negara yang berbeda-beda. Meskipun demikian, terdapat kesepakatan umum bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang disengaja dan berorientasi pada perbaikan kondisi kehidupan masyarakat (Bratakusumah, 2011).

Sondang P. Siagian mendefinisikan pembangunan sebagai serangkaian upaya perubahan dan pertumbuhan yang direncanakan serta dilaksanakan secara sadar oleh bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman guna membangun kehidupan berbangsa (Siagian, 2010). Sementara itu, Ginanjar Kartasasmita mengemukakan pandangan yang lebih sederhana, yakni pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui langkah-langkah yang direncanakan secara sistematis (Kartasasmita, 2010).

Pembangunan juga dipahami sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, termasuk aspek politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya (Abe, 2012). Portes memandang pembangunan sebagai suatu transformasi yang terjadi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya (Porter, 2007). Pandangan serupa dikemukakan oleh Deddy T. Tikson yang menyatakan bahwa pembangunan nasional merupakan proses transformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan secara sadar melalui kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Tikson, 2018). Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan diartikan sebagai proses yang mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang (Sukirno, 2010).

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, pembangunan dapat dipahami sebagai proses perubahan yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun politik, yang berlangsung pada tingkat makro (nasional) maupun mikro. Esensi utama dari pembangunan adalah terciptanya kemajuan, pertumbuhan, serta diversifikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencapai kondisi yang lebih baik (Bratakusumah & Riyadi, 2008).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan suatu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan yang bertujuan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara bersama masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Perencanaan pembangunan dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2010), perencanaan pembangunan terdiri atas: (1) rencana jangka panjang dengan rentang waktu sepuluh tahun atau lebih; (2) rencana jangka menengah dengan jangka waktu antara tiga hingga delapan tahun; dan (3) rencana jangka pendek dengan jangka waktu setengah tahun hingga dua tahun.

Dengan demikian, pembangunan dapat disimpulkan sebagai suatu proses perubahan yang melibatkan seluruh sistem sosial, mencakup aspek politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, serta budaya. Oleh karena itu,

pelaksanaan pembangunan menyentuh seluruh dimensi kehidupan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari peran serta kondisi masyarakat desa sebagai bagian dari sistem pembangunan secara keseluruhan.

F. Kajian Teori

1. Demokrasi a. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, sehingga demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan yang bersumber dari kehendak rakyat (Budiardjo, 2015).

Konsep demokrasi yang paling dikenal secara luas dikemukakan oleh Abraham Lincoln, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makna dari konsep tersebut menegaskan bahwa kekuasaan politik tidak hanya berasal dari rakyat, tetapi juga harus dijalankan demi kepentingan rakyat. Namun demikian, dalam praktik kehidupan politik modern, penerapan demokrasi sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan konsep ideal tersebut.

Robert A. Dahl (1985) mengemukakan bahwa tidak ada negara yang benar-benar dapat dikategorikan sebagai negara demokrasi ideal. Menurutnya, demokrasi dalam praktik lebih tepat dipahami sebagai suatu sistem politik yang mendekati nilai-nilai demokratis, yang ia sebut sebagai *polyarchy*. Sistem ini ditandai oleh adanya kompetisi politik yang sehat serta partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan pandangan tersebut, demokrasi dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu kondisi politik yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, sekaligus menjamin adanya kebebasan yang bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian demokrasi bisa dideskripsikan juga sebagai sistem politik kebebasan yang dilindungi. Tidak ada kebebasan tanpa demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan. Namun kebebasan tersebut dibatasi. Pembatasnya adalah kepentingan umum atau kepentingan bersama. Kebebasan itu juga, sekali lagi, dilindungi. Pelindungnya adalah

negara, dalam bentuk konstitusi, hukum, atau undang-undang. Secara ringkas demokrasi bisa dipandang sebagai institusionalisasi kebebasan.

Demokrasi menjamin hak setiap orang dalam kehidupan berpolitik. Demokrasi menurut Dahl adalah suatu kondisi dalam tertib politik di suatu negara yang mencakup dua dimensi yaitu perlombaan dan peran serta. Peran serta warga suatu negara menjadi hal yang penting dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi menjadi pilihan politik Indonesia sejak lahirnya sebuah negara dan dinilai sebagai metode politik pemerintahan yang sempurna. (Robert Dahl, 2010, 8) Menurut Schumpeter (1991) dalam Usman Effendi dijelaskan demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Kemampuan untuk memilih pemimpin inilah yang disebut sebagai demokrasi. Demokrasi merupakan suatu cara dalam kegiatan politik dengan mengedepankan suara bersama tidak pada salah satu pihak saja (Usman Effendi. 2014:1)

Hal tersebut diungkapkan pula oleh Kovacs (1990) dalam Zamroni bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang mengembangkan individu melalui partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan berdasar pada kebebasan, pandangan kritis serta reflektif untuk membangun kebersamaan dan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan yang hendak dicapai dalam kehidupan demokrasi adalah berdasar pada masyarakat. (Zamroni, 2011:16)

Menurut penjelasan para ahli di atas, dalam penelitian ini mengacu pada teori Dahl, yang menjelaskan bahwa demokrasi adalah kondisi dalam tertib politik di suatu negara yang mencakup dua dimensi yaitu perlombaan dan peran serta. Hal ini karena bentuk kehidupan yang demokrasi adalah mengembangkan masyarakat untuk berperan serta secara bebas untuk membangun kebersamaan dan kesejahteraan sehingga cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terwujud. Peran serta warga suatu negara menjadi hal yang penting dalam kehidupan demokrasi. Dalam demokrasi keberadaan masyarakat yang berada di dalamnya sangat besar pengaruhnya dan dapat menentukan perjalanan suatu organisasi atau lembaga tersebut, karena akan mendorong dan memotivasi serta turut serta menentukan masa depan lembaga tersebut.

b. Nilai-Nilai Demokratis

Nilai dapat dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki arti penting, bernilai, serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap berharga dan dijunjung tinggi oleh sekelompok masyarakat yang meyakini. Menurut Sjarkawi (2006: 29), nilai adalah karakteristik suatu objek yang menjadikannya disukai, diinginkan, dihargai, bermanfaat, serta dipandang penting oleh individu maupun kelompok. Nilai berkaitan erat dengan kepentingan dasar manusia karena setiap individu membutuhkan nilai sebagai pedoman dalam mengatur sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai juga sering dipahami sebagai seperangkat aturan yang berfungsi mengarahkan tindakan manusia agar berjalan tertib dan teratur. Aturan dibuat untuk membatasi perilaku agar tidak bersifat sewenang-wenang sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam aturan tersebut termuat pedoman mengenai perilaku yang patut dilakukan serta larangan terhadap perbuatan yang tidak baik. Sejalan dengan pendapat tersebut, Zuriyah (2007: 19) menyatakan bahwa nilai merupakan pola keyakinan yang berkembang dalam masyarakat mengenai tindakan yang dianggap baik dan buruk. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengenali dan menetapkan nilai-nilai tertentu sebagai pedoman dalam berperilaku sosial.

Segala sesuatu yang dianggap bernilai akan menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh manusia. Paul Suparno dkk. (2006: 75) menjelaskan bahwa nilai merupakan hakikat suatu hal yang membuatnya layak untuk dikejar. Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang harmonis dan damai, manusia menjadikan nilai sebagai dasar dalam bertindak. Nilai juga berfungsi sebagai landasan pembentukan aturan sosial dalam masyarakat. Perbedaan nilai antarwilayah dapat terjadi karena dipengaruhi oleh norma, keyakinan, dan budaya setempat, meskipun tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menciptakan ketenteraman dan kedamaian.

Nilai-nilai demokrasi telah berkembang sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada masa sekarang, penanaman nilai demokrasi dapat dilakukan sejak dini melalui pembiasaan sikap saling menghormati antarindividu. Terwujudnya negara yang demokratis sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembangunan budaya

demokrasi tidak cukup hanya melalui peraturan formal, tetapi juga memerlukan proses sosialisasi yang berkelanjutan.

Saiful Arif (2007: 58–59) menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem politik atau aturan formal dalam konstitusi, tetapi juga sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi sikap toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesetaraan hak, serta penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi. Dengan demikian, nilai demokrasi mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati demi terciptanya kehidupan sosial yang adil dan harmonis.

Sama halnya dengan pendapat Zamroni (2001: 32) yang menyebut bahwa nilai demokrasi yaitu,

- a. toleransi
- b. kebebasan dalam mengutarakan pendapat
- c. menghormati pendapat yang berbeda
- d. memahami keanekaragaman dalam masyarakat
- e. terbuka dalam komunikasi
- f. menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan
- g. percaya diri
- h. saling menghargai
- i. mampu mengendalikan diri
- j. kebersamaan
- k. keseimbangan

Nilai demokrasi tidak langsung tertanam dalam pribadi seseorang, melainkan melalui berbagai tahapan. Nilai demokrasi yang menjadi fokus penelitian ini meliputi nilai berpartisipasi, toleransi dan saling menghargai.

1. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam sistem demokrasi, karena mencerminkan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Zamroni (2009) menyatakan bahwa partisipasi

menekankan pada peran aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan publik sebagai wujud pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat saja berupa pelibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggungjawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi bisa juga berarti ikut campur secara mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok, sehingga mereka termotivasi untuk mendukung pencapaian tujuan kelompok tersebut. Pendapat lain menyebutkan bahwa partisipasi adalah ikut serta secara pikiran dan emosi dari para pekerja dalam situasi kelompok tertentu, serta merasa bertanggungjawab pada kelompok tersebut.

Partisipasi juga bisa diartikan sebagai proses sukarela dimana orang-orang, termasuk yang kurang beruntung (seperti dalam hal penghasilan, gender, suku, atau pendidikan), mempengaruhi atau mengendalikan keputusan yang langsung berdampak pada hidup mereka, seperti yang dijelaskan oleh Deepa Naryan pada tahun 1995.

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman, seperti dikemukakan oleh Siti Irene Astuti D. (2009: 32), adalah berpartisipasi secara mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorong seseorang untuk memberi kontribusi terhadap tujuan kelompok serta berbagi tanggung jawab bersama. Menurut Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001:201-202), partisipasi bisa diartikan sebagai pembuat keputusan yang mengajak kelompok atau masyarakat untuk turut terlibat dengan memberikan saran, pendapat, barang, keterampilan, bahan, dan jasa. Selain itu, partisipasi juga berarti kelompok memahami masalah mereka sendiri, mempertimbangkan pilihan, membuat keputusan serta menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Tilaar (2009) memandang partisipasi sebagai bagian dari upaya penguatan demokrasi melalui desentralisasi, di mana masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak bersifat insidental, melainkan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Partisipasi sebagaimana disampaikan oleh Syamsudin Adam dalam bukunya Prasetya (2008: 54) yang dimaksud dengan partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses analisa masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang beberapa solusi lain untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. (2009:34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada wargasebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika iamemberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembagapemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekatpada setiap individu yang bersangkutan.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan

keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat.

- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan insidental.
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*)

Dalam konteks penelitian ini, partisipasi masyarakat dimaknai sebagai keterlibatan aktif warga Desa Kutukulon dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa sebagai wujud penerapan nilai demokrasi di tingkat desa.

2. Toleransi

Istilah toleransi ini pertama kali lahir di Barat, di bawah situasi dan kondisi politis, sosial dan budayanya yang khas. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu *tolerantia*, yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Dari makna dan kandungan bahasa ini kemudian dapat dipahami bahwa toleransi merupakan sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar menyampaikan pendapatnya, sekalipun pendapatnya salah dan berbeda. (Zuhairi Misrawi, 2007: 161)

Sri Narwanti (2011: 29) menuturkan bahwa toleransi adalah sikap atau tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri sendiri. Terdapat indikator sikap toleransi dalam pembelajaran adalah sebagai berikut.

- a. kesamaan sikap dan pelayanan terhadap siswa tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, status sosial dan status ekonomi.
- b. Memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus.
- c. Bekerja bersama sama dengan teman-teman yang berbeda jenis kelamin, agama, suku, dan tingkat kemampuan.
- d. Tidak memaksakan pendapat/kehendak kepada orang lain.
- e. Saling menghormati.
- f. Mempunyai perasaan malu jika berbuat kesalahan, takut jika melanggar peraturan, senang jika berbuat kebaikan.

- g. Basa-basi (ramah).
- h. Sopan santun.
- i. Bersuara sewajarnya dan tidak sombong
- j. Saling menghargai

Nurul Zuriah (2007: 69) mengungkapkan bahwa saling menghargai/menghormati adalah sikap dan perilaku untuk menghargai dalam hubungan antarindividu dan kelompok berdasarkan norma dan tata cara yang berlaku. Setiap orang harus mempunyai rasa saling menghargai satu sama lain tanpa melihat dari latar belakang sosialnya. Rasa saling menghargai tergambar dalam kehidupan sehari-hari seperti menyapa, senyum, memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan haknya, dan lain sebagainya.

Menghormati perbedaan pendapat merupakan sikap dan perilaku seseorang dalam memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengungkapkan ide atau gagasannya. Tidak memaksakan pendapatnya sendiri meskipun pendapat itu berbeda dengan orang lain. Jika terdapat perbedaan, hendaknya diputuskan dengan musyawarah untuk mufakat tanpa merugikan salah satu pihak.

c. Macam-macam Demokrasi

Macam-macam demokrasi banyak dipakai dalam suatu negara dengan banyak macam-macamnya. Jadi, mengenai macam-macam demokrasi dapat dikelompokkan dalam beberapa pembagian antara lain sebagai berikut:

1) Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

- Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*):

Pengertian demokrasi langsung adalah demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Demokrasi langsung, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya.

- Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*):

Pengertian demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Demokrasi tidak langsung, rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Sehingga dalam demokrasi tidak langsung wakil rakyat terlibat secara langsung dengan menajd perantara seluruh rakyat.

2) Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Fokus Perhatiannya^{[1][2]}

- Demokrasi Formal: Pengertian demokrasi formal adalah demokrasi yang berfokus dari bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi
- Demokrasi Material: Pengertian demokrasi material adalah demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik.
- Demokrasi Gabungan: Pengertian demokrasi gabungan adalah demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi.

3) Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi

- Demokrasi Liberal

Pengertian demokrasi liberal adalah demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara. Demokrasi liberal dimana setiap individu dapat mendominasi dalam demokrasi ini. Pemerintah tidak akan banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat dimana pemerintah memiliki kekuasaan terbatas. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusi yang dibatasi oleh konstitusi.

- Demokrasi Komunis

Pengertian demokrasi komunis adalah demokrasi yang berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya dimana pemerintah mendominasi atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa atau pemerintah. Demokrasi komunis tidak dibatasi dan bersifat totaliter yang membuat hak setiap individu tidak ada pengaruhnya pada pemerintah.

- Demokrasi Pancasila: Pengertian demokrasi pancasila adalah demokrasi yang didasarkan dari ideologi Indonesia, yaitu Pancasila berdasar dari tata sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan yang dianut Indonesia.

4) Ciri-ciri Demokrasi

Ciri-Ciri Pemerintahan Demokrasi - Ciri-ciri demokrasi digambarkan dalam suatu pemerintah didasarkan atas sistem demokrasi adalah sebagai berikut:

- Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.
- Ciri Konstitusional, yaitu mengenai kepentingan, kehendak ataupun kekuasaan rakyat yang dituliskan di konstitusi dan undang-undang negara.
- Ciri Perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan dari beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
- Ciri Pemilihan umum, yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam pemerintahan
- Ciri Keperwakilan, yaitu partai menjadi sebuah sarana atau media sebagai bagian pelaksanaan sistem demokrasi
- Ciri kekuasaan, yaitu terdapat pembagian dan juga pemisahan kekuasaan
- Ciri Tanggung Jawab, yaitu dengan adanya tanggung jawab baik pihak yang telah terpilih dapat ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi

Ciri-Ciri Demokrasi - Menurut Bingham Powl, Jr, ciri-ciri demokrasi adalah sebagai berikut...

- Legitimasi pemerintah, didasarkan dari keputusan pemerintah yang mewakili keinginan rakyat, artinya apapun yang dilakukan pemerintah baik patuh pada aturan hukum didasarkan untuk menenangkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kehendak rakyat
- Pengaturan yang mengorganisasikan musyawarah mufakat atau perundingan untuk memperoleh legitimasi dengan melalui pemilihan umum yang kompetitif.
- Pemilihan secara rahasia dan tanpa adanya paksaan
- Terdapat hak-hak dasar misalnya kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi dan kebebasan pers.



5) Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Prinsip-prinsip demokrasi jika ditinjau dari pendapat Almadudi yang dikenal dengan "soko guru demokrasi". Menurut Almadudi, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:

- Kedaulatan rakyat
- Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
- Kekuasaan mayoritas
- Hak-hak minoritas
- Jaminan hak asasi manusia
- Pemilihan yang bebas, adil dan jujur
- Persamaan di depan hukum
- Proses hukum yang wajar
- Pembatasan pemerintah secara konstitusional
- Pluralisme sosial, ekonomi dan politik
- Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat
- Prinsip-Prinsip Demokrasi Secara Umum

Selain prinsip demokrasi menurut pendapat para ahli, terdapat beberapa prinsip umum demokrasi antara lain sebagai berikut...

- Keterlibatan warga Negara mengenai pembuatan keputusan politik
- Persamaan di antara warga Negara,
- Setiap warga negara memiliki kesetaraan dan kesetaraan dalam praktik politik
- Kebebasan diakui dan diterima oleh warga Negara

d. Pengertian Desa

Berkaitan dengan kata-kata Desa secara Etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari *perspektif geografis*, Desa atau *village* diartikan sebagai *a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. (R. Bintoro, 2010:6)

Pada umumnya pengertian desa dikaitkan dengan pertanian, yang sebenarnya masih bisa didefinisikan lagi berdasarkan pada jenis dan tingkatannya. Menurut Koentjaraningrat mendefinisikan desa itu sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. (Adisasmita, Rahardjo, 2011, 29) Sedangkan menurut P.H Landis terdapat tiga definisi tentang desa yaitu pertama desa itu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang, kedua desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya mempunyai hubungan yang saling akrab serba informal satu sama lain, dan yang ketiga desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya hidup dari pertanian. Sedangkan menurut Koentjaraningrat desa adalah suatu komunitas kecil yang menetap secara tetap di suatu tempat, masyarakat desa itu sendiri yang mempunyai karakteristik. (Koentjaraningrat, 2015:89)

Kemudian desa dilihat dari factor kebudayaan yang terdapat pada masyarakat desa, maka dalam hal ini tergolong masuk dalam kategori yang belum maju dan masih sederhana. Kebanyakan orang menganggap bahwa masyarakat desa khususnya masyarakat petani masih dianggap secara umum yang mana mereka dianggap seragam atau sama antara masyarakat petani yang satu dengan yang lain. Kenyataannya malah berbanding terbalik dimana masingmasing petani memiliki ciri yang berbeda misalnya saja pada tingkat perkembangan masyarakatnya, jenis tanaman yang ditanam, teknologi atau alat-alat pertanian yang mereka pergunakan, sistem pertanian yang mereka pakai, dan juga topografi atau bentuk kondisi phisik geografiknya.

Masyarakat petani bisa dibagi menjadi dua yaitu antara masyarakat petani tradisional dan petani modern, yang membedakan antara keduanya adalah bagi kelompok petani yang pertama mereka masih tergantung dan ditentukan oleh alam karena masih rendahnya teknologi dan pengetahuan mereka, produksi yang mereka hasilkan hanya untuk usaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menghidupi keluarganya, dan tidak mengejar keuntungan sedangkan kelompok petani yang ke dua mereka lebih mengutamakan mendapatkan keuntungan, mereka juga menggunakan teknologi dan sistem pengelolaan yang modern dan menanam tanaman yang laku di pasaran. (Adisasmita, Rahardjo, 2011: 63)

Dengan demikian yang dimaksud dengan desa adalah merupakan suatu lokasi yang berada di luar wilayah perkotaan, kemudian masyarakatnya sangat memegang teguh adat kebiasaan atau kebudayaan yang begitu kental dengan tidak meninggalkan berbagai perilaku

kebersamaan seperti bentuk-bentuk gotong royong, kebiasaan kerja bakti dan berbagai perilaku lainnya yang sangat dijunjung oleh masyarakat di desa tersebut.


G. Definisi Operasional

Tabel Definisi Operasional Variabel

Variabel: Implementasi Nilai Demokrasi dalam Pembangunan Desa Kutukulon

Tabel 1

No	Variabel	Sub Variabel / Dimensi	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan
1	Implementasi Nilai Demokrasi dalam Pembangunan Pedesaan	Partisipasi Masyarakat	Keikutsertaan dalam musyawarah desa; Penyampaian aspirasi; Keterlibatan pelaksanaan; Pengawasan pembangunan	Kepala Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa	Wawancara, Observasi, Dokumentasi

2	Implementasi Nilai Demokrasi dalam Pembangunan Pedesaan	Musyawarah Desa	 <p>Keterlibatan unsur desa; Pengambilan keputusan bersama; Musyawarah mufakat</p>	Kepala Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat	Wawancara, Observasi, Dokumentasi
3	Implementasi Nilai Demokrasi dalam Pembangunan Pedesaan	Transparansi	Keterbukaan program; Keterbukaan anggaran; Akses informasi	Kepala Desa, BPD, LPMD, Masyarakat Desa	Wawancara, Observasi, Dokumentasi
4	Implementasi Nilai Demokrasi dalam Pembangunan Pedesaan	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban; Pelaporan kegiatan; Pengawasan oleh BPD dan masyarakat	Kepala Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat	Wawancara, Observasi, Dokumentasi

5	Implementasi Nilai Demokrasi dalam Pembangunan Pedesaan	Nilai Sosial Demokratis	Toleransi; menghargai; diskriminatif	Saling Tidak	Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa	Wawancara, Observasi
---	---	-------------------------	--------------------------------------	--------------	-----------------------------------	----------------------

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian agar mudah dipahami dan dapat diamati secara empiris di lapangan. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Nilai Demokrasi

Implementasi nilai demokrasi adalah proses penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Implementasi ini dapat diamati melalui keterlibatan masyarakat, pola pengambilan keputusan, serta sikap dan perilaku aktor pembangunan desa.

Indikator:

- Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa
- Kesempatan masyarakat menyampaikan pendapat dan aspirasi
- Pengambilan keputusan melalui musyawarah
- Keterbukaan informasi pembangunan
- Pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga Desa Kutukulon dalam proses pembangunan desa, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa.

Indikator:

- Kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa
- Penyampaian saran, pendapat, dan usulan pembangunan
- Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
- Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan

3. Musyawarah Desa

Musyawarah desa adalah forum pertemuan resmi yang melibatkan pemerintah desa, BPD,

LPMD, tokoh masyarakat, dan warga desa untuk membahas serta menetapkan keputusan terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara mufakat.

Indikator:

- Pelaksanaan musyawarah desa secara rutin
- Keterlibatan berbagai unsur masyarakat
- Proses pengambilan keputusan secara mufakat
- Kebebasan menyampaikan pendapat dalam musyawarah

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan penggunaan anggaran pembangunan desa kepada masyarakat secara jelas dan mudah diakses.

Indikator:

- Penyampaian informasi anggaran desa kepada masyarakat
- Ketersediaan papan informasi atau laporan pembangunan
- Kejelasan informasi mengenai program dan kegiatan pembangunan

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa, baik secara administratif maupun moral, kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator:

- Penyusunan laporan pertanggungjawaban pembangunan
- Penyampaian hasil pembangunan kepada masyarakat
- Kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan

6. Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menerima perbedaan pendapat, latar belakang, dan kepentingan antarwarga desa dalam proses pembangunan desa.

Indikator:

- Menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah
- Tidak memaksakan kehendak kepada pihak lain
- Sikap saling menghormati antar peserta musyawarah

7. Saling Menghargai

Saling menghargai adalah sikap dan perilaku masyarakat dan pemerintah desa dalam menghormati hak, pendapat, dan peran masing-masing pihak dalam proses pembangunan desa.

Indikator:

- Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara
- Tidak merendahkan pendapat pihak lain
- Menjaga etika dan sopan santun dalam musyawarah

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan **penelitian kualitatif**, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menekankan pada proses serta makna dari suatu fenomena sosial. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam permasalahan yang diteliti berdasarkan sudut pandang subjek penelitian dalam konteks alamiah (natural setting). Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif umumnya berbentuk kata-kata, narasi, dan dokumentasi visual, bukan angka-angka statistik, sehingga peneliti dapat menggambarkan realitas sosial secara komprehensif sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan (Moleong, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembangunan desa berdasarkan pemahaman, pengalaman, dan pandangan masyarakat serta aparatur desa yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu mengungkap makna, pola perilaku, dan dinamika partisipasi masyarakat secara mendalam dan kontekstual (Sugiyono, 2018).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. (Sutopo, 2008:52) Pemilihan lokasi atau site selection menurut Sukmadinata berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti. (Sukmadinata, 2007, 102)

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Kutukulon Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang menjadi tempat kegiatan pembangunan desa dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan mulai dari persiapan pembangunan dan perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut.

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan menggunakan metode purposive sampling yaitu menentukan sejumlah informan dimana peneliti telah memahami ciri-cirinya sesuai dengan kebutuhan dalam hal ini diambil 10 orang informan, dengan alasan bahwa orang-orang tersebut memahami dan mengetahui lebih banyak berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun orang-orang tersebut terdiri dari bapak Supriyono sebagai Kepala Desa, Moh. Nasrudin, Katimun, Yeni Susilo, Imam Sahroni dan Riyanti sebagai Pengurus BPD, Slamet Riyadi dan Aris Ahmadi sebagai Pengurus LPMD dan beberapa masyarakat desa/tokoh masyarakat

4. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). Hasil observasi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pembahasan penelitian secara menyeluruh mulai dari awal sampai akhir pelaporan penelitian (Sugiyono, 2018:106)

b) Wawancara

Jenis metode penelitian yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab antara informan dengan panduan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan permasalahan guna mendapatkan tanggapan dan jawaban agar diperoleh jalan keluar yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2018:114) menyatakan *Interviewing is at the heart of social research. If you look through almost any sociological journal, you will find that much social research is based on interview, either standardized or more in-depth.*

maksud kalimat tersebut adalah bahwa interview adalah merupakan hatinya penelitian sosial. Bila anda lihat jurnal dalam ilmu sosial, maka akan anda temui semua penelitian social didasarkan pada interview, baik yang standar maupun yang dalam. c) Dokumentasi

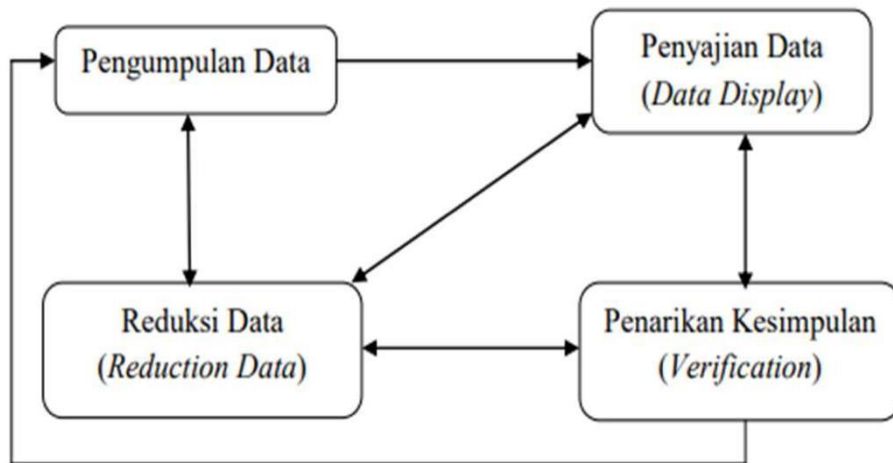
Dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Dokumentasi itu sendiri tujuannya adalah untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan berupa keterangan dan halhal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan.

Menurut Sugiyono (2018:124) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalannya catatan harian sejarah kehidupan (*life histories*) cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lainlain.

5. Teknik Analisa Data

Cara yang digunakan untuk melakukan analisa data dalam penelitian ini adalah teknik *deskriptif kualitatif* atau lebih spesifik menggunakan model *interaktif*. Berdasarkan pendapat Nawawi dan Hadari menyatakan: Metode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki, sebagaimana adanya fakta yang aktual pada saat sekarang. (Nawawi dan Hadari, 2008: 26)

Kemudian model interaktif diartikan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono menjelaskan bahwa: dalam pandangan model *interaktif* ada tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) (Sugiyono, 2018:129) Selanjutnya dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Sumber data: Sugiyono, 2018

Gambar 1. Model Interaktif (Komponen dalam Analisis Data)

Berdasarkan gambaran diatas, menunjukkan bahwa dalam penelitian data diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan (Kepala Desa, Pengurus BPD, Pengurus LPMD dan Masyarakat Desa/tokoh masyarakat) yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan pembangunan desa. Jawaban informan yang terkumpul kemudian dilakukan sortir untuk mencari jawaban yang benar -benar sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud dalam wawancara. Hasil jawaban tersebut kemudian dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk tabel yang selanjutnya akan diberi penafsiran secara objektif dan sesuai dengan fakta yang ditemukan.

Kegiatan analisis data, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono menyebutkan bahwa kegiatan analisis data terdiri dari 3 kegiatan utama yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun untuk menambah pemahaman mengenai bahan-bahan itu semua dan untuk mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan. Analisis data dilakukan

dengan cara menata secara sistematis catatan-catatan hasil wawancara maupun data dokumentasi dan observasi. Penataan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penajaman pemahaman terhadap makna data dan menyajikannya sebagai hasil temuan dalam penelitian. (Sugiyono, 2018:133)

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan pentransformasian data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, mulai dari awal sampai akhir sebuah penelitian yang berorientasi kualitatif. Reduksi data pada awal penelitian misalnya ditetapkannya wilayah penelitian, penentuan permasalahan penelitian, definisi operasional dari istilah yang dipakai dan penentuan pendekatan dalam pengumpulan data. Reduksi data selama pengumpulan data dapat berupa pembuatan ringkasan, pengkodean, menelusuri tema, pembuatan batas-batas permasalahan dan pembuatan transkrip yaitu berupa satu lembar kertas yang berisi uraian singkat hasil penelaahan terhadap catatan lapangan, pemfokusan dan jawaban terhadap masalah penelitian. (Sugiyono, 2018:134)

Sebagai pusat perhatian reduksi data adalah menyiapkan dan mengolah data sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk itu diperlukan kegiatan menajamkan, menggolongkan, menga-rahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan susunan informasi yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penyajian data yang utama adalah mempermudah peneliti memahami keseluruhan data, sehingga dapat membantu dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk menganalisis data. Sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih terperinci, sehingga diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

c. Penarikan kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi data dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis, pada dasarnya sudah memberikan arahan bagi kegiatan penyimpulan data. Dari awal pengumpulan data peneliti sudah mulai berupaya memahami makna data yang dijumpai, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap selanjutnya akan semakin jelas dan mudah dipahami. Sehingga pembahasan yang dilakukan akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Lebih lanjutnya penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

